

# **PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo)**

**Yuni Ashari**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palopo  
yuniashari1598@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of accounting controls, reporting systems and clarity of budget targets on the performance accountability of government agencies. This research was conducted at BPKAD Kota Palopo City. The type of data used in this study is quantitative data sourced from primary data and secondary data. The data collection technique used was a survey using a questionnaire to all employees who worked at the Palopo City BPKAD as many as 53 respondents, but only 49 questionnaires could be analysed and processed. Analysis of the influence of variables using multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate that government accounting control has a positive and significant effect on the accountability of the performance of government agencies at the Palopo City BPKAD office. The reporting system has a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies at the Palopo City BPKAD office, and the clarity of budget targets has a positive and significant effect on the accountability of the performance of government agencies at the Palopo City BPKAD office.*

**Keywords :** *Accounting Controls, Reporting Systems, Clarity Of Budget Targets, Accountability For Performance Of Government Agencies.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di BPKAD Kota Palopo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu survei dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada seluruh karyawan yang bekerja pada BPKAD Kota Palopo sebanyak 53 responden, tetapi hanya 49 kuesioner yang dapat dianalisis dan diproses. Analisis pengaruh variable menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo, system pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo

**Kata Kunci:** Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1. PENDAHULUAN

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang terutang secara kuantitatif (Sasongko, 2010). Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan dana sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut untuk memungkinkan melaksanakan tanggung jawabnya.

Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antarlain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan pula peraturan-perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah

satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab. Dengan berbagai peraturan perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Azlina, 2011).

Dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Kusumaningrum (2010), mengatakan bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan,

sistem pelaporan dan prosedur *monitoring* yang didasarkan pada informasi.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Pemerintah Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang ada di propinsi Sulawesi selatan yang mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari badan pemeriksa keuangan (BPK) sejak tahun 2016 sampai 2019. Pemerintah Kota Palopo memperoleh predikat tersebut dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk keempat kalinya secara berturut turut (<http://radarluwuraya.com> 2019). Predikat badan pemeriksa (BPK) ini menjadi tolak ukur untuk mengukur apakah kinerja keuangan Pemerintah Kota Palopo memenuhi standar. Publik mempersepsi bahwa opini WTP mencerminkan penggunaan keuangan yang benar, padahal berulang kali BPK

mengingatkan bahwa lembaga yang mendapat opini WTP tidaklah di jamin bebas dari korupsi. Opini WTP hanya sekedar pernyataan BPK terhadap suatu pengelolaan keuangan tiap-tiap lembaga. Namun masih banyak daerah yang sudah meraih opini WTP tetapi banyak di temukan masalah dalam pengelolaan keuangan pemerintah di kutip dalam (<http://www.cnbcindonesia.com> , 2019) oleh karena itu peneliti mengambil objek pada kantor BPKAD Kota Palopo.

Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lakukan oleh riska dwi dan fitriana (2018) menyimpulkan bahwa secara simultan atau bersama sama variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan secara simultan atau bersama sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. dan penelitian yang di lakukan rio pratama (2019) Pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab.Padang Pariaman. Sedangkan Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab.Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas,dan terdapat perbedaan hasil penelitian dapat diangkat sebagai permasalahan dalam suatu penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palopo**”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Pengendalian akuntansi** Menurut definisi, pengendalian (*control*) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang tepat.

Pengendalian dan laporan akuntansi mengenai operasi merupakan bagian dari suatu rencana yang terpadu dengan baik untuk memelihara efisiensi dan menetapkan penyimpangan atau trends yang tidak memuaskan. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan diadakannya pengendalian biaya dan perbandingan biaya-biaya tersebut dengan rencana tindakan yang ditetapkan sebelumnya, melalui pengukuran prestasi kerja dengan catatan dan laporan-laporan akuntansi dan statistik, manajemen dapat memberikan petunjuk yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Pengendalian akuntansi mencakup semua aset dari transaksi-transaksi keuangan seperti misalnya pembayaran kas, penerimaan kas, arus dana, investasi yang bijaksana dan pengamanan dan dari penggunaan tidak sah.

Penerimaan dan pengeluaran daerah (APBD) harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis *varians* atau selisih yakni metode analisis statistik inferensi terhadap penerimaan dan pengeluaran daerah agar dapat segera mungkin dicari penyebab timbulnya *varians* dan tindakan antisipasi kedepan.

Pengendalian Akuntansi Menurut John Wiley dan Sons, Inc (1995:102)

menjelaskan bahwa “Pengendalian Akuntansi (*Accounting Controls*) berkaitan dengan rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang menyangkut penjagaan aktiva dan keandalan catatan keuangan karena itu dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai mengenai : (1). Transaksi yang dilaksanakan sesuai dengan otorisasi manajemen yang bersifat umum atau khusus (2). Transaksi dicatat seperlunya untuk memungkinkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau kriteria lain yang dapat diterapkan pada laporan semacam itu dan untuk menjaga tanggung gugat (*Accountability*) atas aktiva.

### **Sistem Pelaporan**

Pada dasarnya kata sistem berasal dari bahasa Yunani “*Sytema*” yang berarti kesatuan, yakni keseluruhan dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu sama lain.

Menurut Mulyanto (2009:1) sistem dapat diartikan sebagai berikut: “Sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan”.

Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen baik yang berbentuk fisik maupun bukan fisik yang menunjukkan suatu kumpulan saling berhubungan diantaranya dan berinteraksi bersama-sama menuju satu atau lebih tujuan, sasaran atau akhir dari sistem.

Halim (2007: 326) menjelaskan bahwa Laporan keuangan adalah: “Informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut”. Sedangkan Pelaporan Keuangan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.

Menurut Ismaya (2005:490) pengertian pelaporan keuangan adalah: “Suatu laporan yang disertai segala implementasinya dengan melalui penyediaan neraca dan ikhtisar laba rugi”.

Menurut Midjan (1986:85) sistem pelaporan yang baik adalah “Dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak–pihak yang berkepentingan”.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP : 2000) mengemukakan laporan yang baik adalah “Laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas–aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan”.

### **Kejelasan sasaran anggaran**

Menurut Suharono dan Solichin (2006) “Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.”

Menurut Saputra (2014), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan, yaitu: tujuan, kinerja,

standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan dan koordinasi

Menurut Mardiasmo (2002) “Wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk pencapaian kuantabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.”

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi.

Menurut Supriyono (2000) dalam Mahanani (2009) “Anggaran adalah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun.” Sementra itu, Menurut Garrison & Noreen (2000) dalam Safitri (2006) “Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.”

Menurut Kenisdalam Kurnis (2004) indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah :

- a. Jelas, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas serta tidak bermakna ganda.
- b. Spesifik, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar

tidak menimbulkan interpretasi bermacam-macam.

- c. Mengerti, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.

Menurut Yusfaningrum (2005) “Anggaran merupakan pedoman rencana manajemen dimasa yang akan datang mempunyai beberapa manfaat. anggaran memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- a. Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, dan berarti anggaran mewakili kesepakatan dari negosiasi diantara partisipasi dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan pada masa yang akan datang
- b. Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai rencana jangka panjang aktivitas perusahaan.
- c. Sebagai alat komunikasi antar divisi, dimana anggaran sangat membantu melakukan komunikasi internal antar divisi dalam organisasi maupun dalam manajemen puncak. Disamping memiliki manfaat, anggaran juga memiliki kelemahan. Kelemahan yang dimaksud adalah anggaran dapat menimbulkan perasaan tertekan bagi karyawan. Hal ini terjadi apabila anggaran disusun terlalu kaku atau target yang ditetapkan dalam anggaran sulit untuk dicapai.

#### **Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah**

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan

(*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

PP105 tahun 2000 dan PP108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik.

### **3. METODE DAN ANALISIS DATA**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan memberikan gambaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang merupakan penelitian yang menjelaskan tentang gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Penelitian ini memusatkan pada fenomena yang sedang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2016:86)

### Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini akan mengambil surat permohonan izin dilokasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Jl. Jend Sudirman No.163, Binturu, Wara Selatan., Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian yang dibutuhkan selama 2 bulan.

### Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden pada Kantor Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo. Data ini merupakan respon tertulis dari responden (Pegawai Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kota Palopo yang dijadikan sampel penelitian.

Sumber data lainnya itu data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*). *Library Research* dilakukan dengan mempelajari teori-teori ataupun konsep yang telah ada pada buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah. *LibraryResearch* juga dilakukan dengan mengakses *website* atau situs-situs yang digunakan untuk mencari informasi terkait dengan penelitian ini.

### Populasi dan Sampel

Menurut sugiono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di terapkan oleh

peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu kepala BPKAD, sekretariat, bidang anggaran dan perbendaharaan, bidang aset daerah, dan bidang akuntansi sebanyak 112 .

Sedangkan sampel Menurut sugiono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini di gunakan dengan metode sampel acak. Pengambilan sampel acak sederhana untuk pengambilan sampel. Alasan dikatakan sederhana atau (simpl) adalah karna anggota populasi di ambil sampelnya secara acak tanpa mempertimbangkan kelas-kelas yang ada dalam populasi. Cara ini akan di lakukan bila anggota populasi homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat di lakukan melalui undian, pemilihan nomor dari daftar acak, dan lain lain (sugiono,2017). Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk di jadikan sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

Rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

$n$  = ukuran sampel

$N$  = ukuran populasi

$e$  = tingkat kesalahan (10%)

Berdasarkan rumus Slovin di atas, maka dapat diketahui jumlah sampel pada penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{112}{1 + 112. (0,1)^2}$$

=52,8 dibulatkan menjadi 53 orang.

dari hasil perhitungan sampel diatas, maka dapat ketahui jumlah sampel yang harus digunakan dalam penelitian ini yaitu 53 (dibulatkan) yang berperan dalam kantor BPKAD Kota Palopo.

**Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian**

No	Keterangan	Jumlah kuesioner	Presen tase %
1	Distributor kuesioner	53	100%
2	Kuesioner kembali	49	92%
3	Kuesioner yang cacat/kembali	4	7%
4	Kuesioner yang dapat di olah	49	92%
N sampel yang kembali = 49			
Responden rate = 92%			

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2020)

Dari 53 kuesioner yang di bagikan kepada pegawai yang bekerja pada kantor BPKAD Kta Palopo, terdapat 4 kuesioner yang cacat atau tidak kembali di karenakan pada saat di lakukan penelitian tidak semua pegawai berada di tempat. Sebanyak 49 orang pegawai berhasil di kumpulkan sebagai responden dalam penelitian ini, Demogrfi responden dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**  
Berikut ini menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin.

Keterangan	Jumah (orang)	Persentase(%)
------------	---------------	---------------

Jenis		
<b>Kelamin :</b>	24	49%
Laki-laki	25	51%
Perempuan		
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 24 orang atau 49% responden berjenis kelamin laki-laki dan 25 orang atau 51% responden berjenis kelamin perempuan.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Deskriptif Responden Berdasarkan Pendidikan**

Berikut ini menyajikan hasil uji deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin.

Tingkat Pendidikan		
a. SMA/Sederajat	16	33%
b. Diploma	2	4%
c. Strata -1 (S1)	29	58%
d. Strata -2 (S2)	2	4%
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2020)

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa responden berpendidikan SMA/Sederajat sebesar 33% atau 16 orang, 4% atau 2 orang Diploma, 58% atau 29 orang sastra-1(S1), dan 4% atau 2 orang berpendidikan terakhir Sastra-2(S2).

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data Kuantitatif. Data tersebut berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden pada Kantor Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo. Data ini merupakan respon tertulis dari responden (Pegawai Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah



Kota Palopo yang dijadikan sampel penelitian.

Sumber data lainya itu data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan tinjauan kepustakaan (*library research*). *Library Research* dilakukan dengan mempelajari teori-teori ataupun konsep yang telah ada pada buku, jurnal, makalah dan karya ilmiah. *LibraryResearch* juga dilakukan dengan mengakses *website* atau situs-situs yang digunakan untuk mencari informasi terkait dengan penelitian ini.

#### Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dan informasi yang mendukung guna membahas masalah, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Kuesioner (*questionnaire*) yang diberikan, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan daftar pernyataan yang telah disusun secara terstruktur di berikan kepada pegawai yang di jadikan sampel.
- b. Wawancara (*interview*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pertanyaan tidak terstruktur kepada pihak yang berhak dan berwenang mengenai pengaruh pengendalian akuntansi, sistem palaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- c. Penelitian pustaka (*library Research*) Penelitian di maksudkan untuk mengumpulkan data melalui penelitian terhadap buku-buku literature yang berhubungan dengan topik dan masalah yang diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### Uji validitas

Pengujian paliditas dalam penelitian ini di lakukan dengan cara statistik yaitu

menghiyung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *produc moment personcorrelation*. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari *corrected item-total correlation*> dari r table pada siknifikan 0,05 (5%). Berikut ini di sajikan validitas dari masing-masing variabel pada tabel berikut.

**Tabel 4.5** Hasil uji validitas

Varia bel	Item	r hitun g	r Tabel	Ketera ngan
<b>Penge ndali an Akun tansi</b>	X <sub>1.1</sub>	0.525	0.281	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.410	0.281	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.306	0.281	Valid
	X <sub>1.6</sub>	0.456	0.281	Valid
	X <sub>1.7</sub>	0.636	0.281	Valid
	X <sub>1.8</sub>	0.429	0.281	Valid
<b>Siste m Pelap oran</b>	X <sub>2.1</sub>	0.513	0.281	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0.485	0.281	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0.498	0.281	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0.340	0.281	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0.661	0.281	Valid
	X <sub>2.7</sub>	0.283	0.281	Valid
	X <sub>2.8</sub>	0.481	0.281	Valid
<b>Kejel asan Sasar an Angg aran</b>	X <sub>3.1</sub>	0.478	0.281	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0.551	0.281	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0.289	0.281	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0.309	0.281	Valid
	X <sub>3.6</sub>	0.477	0.281	Valid
	X <sub>3.7</sub>	0.293	0.281	Valid
	X <sub>3.8</sub>	0.499	0.281	Valid
<b>Akun tabilit as Kiner ja Insta</b>	Y.1	0.453	0.281	Valid
	Y.2	0.647	0.281	Valid
	Y.3	0.718	0.281	Valid
	Y.4	0.564	0.281	Valid
	Y.5	0.568	0.281	Valid
	Y.6	0.340	0.281	Valid

nsi	Y.8	0.707	0.281	Valid
	Y.9	0.738	0.281	Valid
	Y.10	0.578	0.281	Valid
	Y.11	0.366	0.281	Valid

Sumber: Data diolah di SPSS Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat di ketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel pertanyaan yang valid sebanyak 33 . Karena nilai *corrected item-correlation*> dari r tabel signifikan 0,05(5%).

### Uji Reabilitas

Reabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai indikator variabel. Jika jawaban responden tetap stabil dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap dapat di andalkan. Untuk mengukur nilai reabilitas di gunakan uji statistik *cronbach alpha* (a). jika *cronbach alpha* yang di bangun> 0,60 maka dinyatakan reliabel.

**Tabel 4.6** Hasil Uji Realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,818	40

Sumber: data di olah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *cronbach alpha* dari variabel total lebih besar dari 0,60 sehingga cocok digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini.

### Analisis Regresi Linear berganda

Analisis linear berganda digunajan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7** Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15,995	9,807		-	,110
	Pengendalian akuntansi	,494	,160	,342	3,078	,004
	Sistem pelaporan	,509	,178	,327	2,862	,006
	Kejelasan sasaran anggaran	,704	,249	,309	2,825	,007

Sumber: data di olah di SPSS tahun 2020

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisien variabel bebas x1 (pengendalian akuntansi) sebesar 0,004, koefisien variabel bebas x2 (sistem pelaporan) sebesar 0,006,dan koefisien variabel bebas x3 (kejelasan sasaran anggaran) sebesar 0,007. Oleh karna itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y = -15,995 + 0,494 x_1 + 0,509x_2 + 0,704 x_3 + e$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

X<sub>1</sub> = Pengendalian Akuntansi

X<sub>2</sub> = Sistem Pelaporan

X<sub>3</sub> = Kejelasan Sasaran Anggaran

e = Eror

persamaan linear di atas dapat diketahui bahwa:

- Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar 15,995 artinya

apabila variabel bebas bernilai nol maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah kota palopo tetap sebesar 1,292.

- b. Nilai ( $\beta_1$ ) sebesar 0,494 menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian akuntansi ( $X_1$ ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel pengendalian akuntansi sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,494.
- c. Nilai koefisien ( $\beta_2$ ) sebesar 0,509 menunjukkan bahwa sistem pelaporan ( $X_2$ ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel sistem pelaporan sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,509.
- d. Nilai koefisien ( $\beta_3$ ) sebesar 0,704 menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) **adalah positif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar satu satuan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami kenaikan sebesar 0,704.

#### Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi  $R^2$  dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8** Koefisien Determinasi Adjusted  $R^2$

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,251 <sup>a</sup>	,063	,000	1,63293

Sumber: data di olah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh  $adj.R^2$  dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen yang terdiri dari pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebesar 6,0% sedangkan sisanya 84,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Uji T

**Tabel 4.9** Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15,995	9,807		-1,631	,110
	Pengendalian akuntansi	,494	,160	,342	3,078	,004
	Sistem pelaporan	,509	,178	,327	2,862	,006
	Kejelasan sasaran anggaran	,704	,249	,309	2,825	,007

Sumber: data di olah di SPSS tahun 2020

Berdasarkan dari tabel 4.10 diketahui nilai t tabel pada taraf signifikan 5% dengan persamaan sebagai berikut:

$$T \text{ tabel} = n - k - 1 : \alpha / 2$$

$$= 49 - 3 - 1 : 0,05 / 2$$

$$= 45 : 0,025$$

$$= 1,800$$

Keterangan: n: jumlah

K: jumlah variabel bebas

1: konstan

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen:

1. Hasil pengujian hipotesis H1

H1 : pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan uji statistik t. Bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana t hitung > t tabel dan sig. t < a = 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima dan jika sebaliknya t hitung < t tabel dan sig.t > a= 0,05, maka H0 diterimah dan H1 ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel yaitu 3,078 > 1,800 dan sig.t (0,004) < 0,05 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima maka Dapat disimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Hasil pengujian hipotesis H2

H2 : sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan uji statistik t. Bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana t hitung > t tabel dan sip. T < a = 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima dan jika sebaliknya t hitung < t tabel dan sig.t > a= 0,05, maka H0 diterimah dan H1 ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel yaitu 2,862 > 1,800 dan sig.t ( 0,006) < 0,05, maka H0 ditolak dan H2 diterima dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat kputusan yaitu sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3. Hasil pengujian hipotesis H3

H3 : kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Untuk melihat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan uji statistik t. bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t hitung dengan t tabel serta melihat nilai signifikannya. Dimana t hitung > t tabel dan sip. T < a = 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima dan jika sebaliknya t hitung < t tabel dan sig.t > a= 0,05, maka H0 diterimah dan H1 ditolak.

Dari tabel 4.10 di atas dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel yaitu 2,825 > 1,800 dan sig.t ( 0,007) < 0,05, maka

H0 ditolak dan H3 diterima. dari hasil pengujian tersebut, maka terdapat keputusan yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### Uji F

Uji statistik F dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau devenden. Hasil dari uji F ini dapat di lihat dalam tabel berikut :

**Tabel 4.10** Hasil Pengujian Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	462,132	3	154,044	18,578	,000 <sup>b</sup>
	Residual	373,133	45	8,292		
	Total	835,265	48			

Sumber: data di olah di SPSS tahun 2020

Pada tabel 4.11 di atas dapat di lihat nilai F sebesar 18,578 dengan nilai signifikannya 0,000 nilai signifikan tersebut menunjukan nilai yang jauh lebih dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi dapat di gunakan untuk memprediksi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain bahwa, **Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Secara Bersama-Sama Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

## 4.2 Hasil Dan Pembahasan

### Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis pertama penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_1$ ) sebesar 0,494 dan memiliki nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. pengendalian akuntansi (accounting control) adalah prosedur yang di gunakan untuk menjamin akurasi dalam fungsi penyimpanan catatan (transaksi keuangan) tujuannya adalah untuk membuat sumber data tertentu di tempatkan pada sistem yang baik dan benar.

### Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis kedua penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_2$ ) sebesar 0,509 dan memiliki nilai signifikansi  $0,006 < 0,05$ . Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil dalam penelitian ini Menurut Midjan (1986: 85) sistem pelaporan yang baik adalah “Dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Hipotesis ketiga penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel sistem kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi ( $\beta_3$ ) sebesar 0,704 dan memiliki nilai signifikansi  $0,007 < 0,05$ . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran.

### **5.1 SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu pengaruh

pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis ketiga diterima.

### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain :

1. kurangnya sikap kepedulian dari responden didalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode surfeiy wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.
2. Peneliti hanya menggunakan beberapa variabel indipenden untuk mengetahui pengaruh terhadap akuntabilitas kenerja instansi pemerintah.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa

saran yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapat hasil yang maksimal di perlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner tetapi dapat juga dilakukan juga dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan di isi agar data yang diperoleh nantinya tidak bisa dan sesuai dengan tujuan apa yang di harapkan dalam penelitian.

#### DAFTAR RUJUKAN

##### JURNAL

Siti Ruri Suhaesti 2016 . Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bangkalis). *JUM Fekom* vol 3, no 1

Pratama R., Agustin H & Taqwa S. 2019. Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Explorasi Akuntansi, 1(1) Seri D.*

Herawati, Netty 2011. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, Pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan

terhadap kinerja instansi pemerintah daerah kota jambi. *Jurnal penelitian (online).vol 3 no.2*

Kusuma Ningrum 2018. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daera kabupaten situbondo. *E-JRA Vol 7*

Diah Pancelina 2019. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, Dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daera kabupaten jombang. *Jurnal akuntansi AKUNESA, Vol 7 no 3*

##### SKRIPSI

Cahyani dan utama (2015) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Eko Setiawan (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Harini Susilowati (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta)

Heri setiawan(2017) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi

- pemerintah dengan manajerial sebagai variabel moderating
- Hidayatullah, herdjiono(2015) Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD di marauke
- Karismawati Agustina (2018). Pengaruh kejelasan Sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada SKPD di pemerintah kota Yogyakarta)
- Lumenta, morasa dan mawikere(2016) Pengaruh pengaruh sistem akuntansi pemerintah daera dan ketaatan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota minahasa selatan
- Mulyadi AR (2018). Pengaruh sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Aceh.
- Rio Pratama(2019). Pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kab. Padang Pariaman
- Riska Dwi Fitriana (2018). Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, Dan Sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah daerah kabupaten situbondo
- Wahdatul, rahayu, dan dillak(2016) Pengaruh anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten bandung
- Zakiyudin dan Suyanto (2015). Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada inspectoral jendral kementerian agama RI.

#### **BUKU**

Abdul Hafiz Tanjung, S.E., M.Si. ,Ak. Akuntansi Pemerintahan daerah Berbasis Akrual penerbit: ALFABETA, cv

Ahmad Yani, SH., MM., Ak. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di indonesia.

Baldric Siregar. Bambang Suropto, Akuntansi Manajemen. Salemba Empat

Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010. penegelolaan keuangan dan asset daerah sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Bandung: Fokus media

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisikelima. Penerbit Andi Yogyakarta.

Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Yogyakarta: Salemba Empat

#### **WEBSITE**

Siaran PERS, BPK RI Propensi Sulawesi Selatan. BadanPemeriksaanKeuangan RI Perwakilan Provinsi sulawesi selatan

#### **DOKUMEN RESMI PEMERINTAH**



- Inpres nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
- Intruksi presiden No : 7 tahun 1999, tanggal 15 juni 1999, tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
- Lembaga administrasi Negara (LAN) dan Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP.2000) Mengemukakan laporan yang baik. pasal 20 dan pasal 21 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- PP105 tahun 2000 dan PP108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggung jawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra
- PP No 71 tentang standar akuntansi keuangan ( sap).
- Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.
- (Ghozali, 2005:39). Pertanyaan yang tidak valid harus dikeluarkan dari model kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP : 2000)
- Darma (2004) Menyatakan bahwa salah satu jenis pengendalian adalah pengendalian keuangan dengan memanfaatkan sistem akuntansi.
- Garrison Dan Noreen (2000). Dalam safitri (2006) “ anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lain untuk suatu periode tertentu”
- Halim ( 2007 : 326) menjelaskan laporan bahwa laporan keuangan
- Isamaya ( 2005:4090) Pengertian Pelaporan Keuangan
- Kenis dalam Kurnis (2004) indikator yang di gunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran.
- Krismiaji (2010 : 18) pengendalian akuntansi (accounting control)
- Kusumaningrum (2010) sistem pengendalian akuntansi yang menggunakan informasi akuntansi di sebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi.
- Maddox (2000) menyatakan bahwa pengendalian adalah “ sebuah proses yang di lakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumberdaya di gunakan secara efisien dan efektif”.
- Mardiamo (2002). “wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang di lakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata

#### **PAKAR DAN PARA AHLI**

- untuk mencapai akuntabilitas public”.
- Maryanto(2007:1). Pengertian Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah
- Menurut (Alfari, 2000:62). Formulasi regresi linear berganda
- Midjan (1986 : 85) sistem pelaporan yang baik adalah “dapat memantau dan mengendalikan kinerja manager dalam mengimplementasikan anggaran yang telah di tetapkan.
- Mulyanto (2009:1) sistem dapat diartikan sebagai berikut “sistem merupakan kumpulan dari elemen elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan”.
- Saputra (2014). Agar pengukuran sasaran efektif ada 7indikator yang di perlukan.
- Sasongko (2010). penyusunan anggaran.
- Suharono dan Solihin (2006) kejelasan sasaran anggaran
- Supriono (2000) Mahanani (2009). “anggaran adalah suatu rencana terinci yang di nyatakan secara fomaal dalam ukuran kuantitatif untuk meenunjukkan bagaimana sumber-sumber akan di peroleh dan di gunakan selama jangka waktu tertentu,umumnya 1 tahun”.
- Yusfaningrum (2005) “ anggaran merupakan podoman rencana manajemen di masa yang akan dating memounyai beberapa manfaat.